

BAB II

PERKEMBANGAN PROPINSI DKI JAKARTA 2002-2007

2.1. PERAN PROPINSI DKI JAKARTA DALAM PERSPEKTIF NASIONAL

Permasalahan Propinsi DKI Jakarta pada prinsipnya berakar dari tuntutan peran dan fungsinya yang sedemikian besar, baik dalam lingkup nasional maupun daerah. Peran Propinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara dan fungsi Propinsi DKI Jakarta sebagai Kota Jasa (*service city*) mendorong pemerintah daerah menyusun visi, misi, tujuan dan strategi pembangunan yang mampu mengakomodir berbagai kepentingan.

2.1.1 Peran Propinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara.

Peran Propinsi DKI Jakarta sebagai ibukota negara, pusat pemerintahan dan kota internasional dalam perkembangannya menghadapi berbagai masalah. Untuk menampilkan citra bangsa dan negara bagi dunia luar, serta sebagai tempat kedudukan hampir keseluruhan perangkat pemerintahan tingkat nasional, perwakilan negara-negara asing, pusat-pusat perusahaan multi nasional, dan gerbang utama wisatawan manca negara, Propinsi DKI Jakarta dituntut terus berbenah diri. Sarana dan prasarana yang belum memadai, daya dukung lingkungan yang makin terbatas, serta kemajuan masyarakat metropolitan menjadi ciri umum permasalahan pembangunan yang dihadapi. Selama ini, kebijaksanaan dan arahan pembangunan yang ditempuh pemerintah daerah selalu berorientasi pada 2 hal pokok yakni:

1. Mempercepat pembangunan untuk mengatasi dan mengantisipasi berbagai masalah.
2. Mempercepat pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Akan tetapi kemakmuran yang dicapai diatas pondasi masalah yang masih besar seringkali akan menimbulkan permasalahan baru, terlebih dalam masa pemulihan pasca krisis sekarang ini.

2.1.2. Fungsi Propinsi DKI Jakarta Sebagai Kota Jasa (*service city*)

Untuk mendukung fungsi Propinsi DKI Jakarta sebagai Kota Jasa (*service city*), pembangunan yang dilakukan harus dapat mendukung fungsi-fungsi pelayanan kota baik untuk kepentingan lokal, nasional maupun internasional. Penjabaran sebagai Kota Jasa (*service city*) adalah menjadikan Propinsi DKI Jakarta sebagai:

1. Pusat Pelayanan Masyarakat
2. Pusat Perdagangan dan Distribusi
3. Pusat Keuangan
4. Pusat Pariwisata
5. Pusat Pelatihan dan Informasi

Pemenuhan keseluruhan fungsi tersebut memerlukan upaya pembangunan yang sangat besar, dan tidak mungkin dilaksanakan sendiri oleh pemerintah daerah, oleh karena itu diperlukan keterlibatan Pemerintah Pusat, Sektor Swasta dan Masyarakat.

2.2. PERKEMBANGAN MAKRO SOSIAL-EKONOMI 2002-2007

Dinamika politik nasional dalam lima tahun terakhir telah menjadi proses pembelajaran berarti bagi kehidupan masyarakat dalam berdemokrasi. Diharapkan ke depan, masyarakat akan menjadi lebih dewasa dalam menyikapi reformasi dan tidak terjebak pada kebebasan yang tidak terkendali yang dapat mematahkan dan mengabaikan supremasi hukum yang telah menjadi komitmen bersama. Dengan kata lain, terbentuknya masyarakat madani dan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) untuk menjamin berlangsungnya kehidupan sosial-ekonomi masyarakat yang lebih baik.

Di bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi Propinsi DKI Jakarta sampai dengan tahun 2007 diharapkan akan tetap positif sebagaimana pertumbuhan yang dicapai pada tahun 2000 dan 2001. Sebelum krisis ekonomi, pertumbuhan ekonomi Propinsi DKI Jakarta mencapai rata-rata 7 hingga 8 persen per tahun, kemudian selama puncak krisis tahun 1998 dan 1999, pertumbuhan mengalami kontraksi masing-masing sebesar minus 17,5 persen

dan minus 0,29 persen. Kinerja ekonomi mulai menunjukkan pertumbuhan positif pada tahun 2000 dan 2001 yaitu mencapai masing-masing 3,98 persen dan 3,64 persen. Diharapkan untuk tahun 2002 sampai 2007 tetap akan tercapai pertumbuhan positif antara 4 hingga 6 persen per tahun. Inipun masih akan tergantung pada seberapa jauh stabilitas politik, penegakan hukum dan ketertiban masyarakat dapat dicapai dan diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi secara kondusif lima tahun kedepan.

Selanjutnya inflasi diharapkan tetap dapat ditekan di bawah 2 digit per tahun selama lima tahun kedepan. Seperti telah diketahui, pada tahun 1998 telah terjadi hiper-inflasi yang mencapai 74,4 persen, walaupun kemudian dapat ditekan menjadi sebesar 1,80 persen pada tahun 1999, karena pengalaman hiper-inflasi tahun sebelumnya. Sedangkan untuk tahun 2000 dan 2001 inflasi mencapai masing-masing 10,29 dan 11,52 persen, cukup tinggi namun tidak dapat dihindari karena kebijakan nasional menaikkan harga BBM dan tarif listrik untuk mengurangi subsidi, serta merosotnya nilai tukar rupiah.

Dengan pertumbuhan ekonomi positif, diharapkan angka pengangguran pada tahun 2002-2007 terus akan menurun dan dapat ditekan tidak lebih besar dari 10 persen mulai tahun 2003. Seperti diketahui pada tahun 1999 angka pengangguran mencapai angka tertinggi sebesar 13,2 persen kemudian turun pada tahun 2000 dan 2001 menjadi 12,08 persen dan 11,32 persen. Hal ini ditandai pula oleh mulai bergeraknya kembali sektor dunia usaha terutama pada industri, perdagangan dan jasa, sebagai pilar utama perekonomian Propinsi DKI Jakarta.

Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,28 persen per tahun selama periode 2003–2007 tentunya diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Jumlah kesempatan kerja yang dapat disediakan dalam periode ini adalah 470 ribu atau mencapai 94 ribu per tahun. Dengan jumlah tambahan kesempatan kerja sebesar ini maka tingkat pengangguran dapat diredam untuk tidak bertambah tinggi yaitu dari 10,34 persen tahun 2003 menjadi 6,59 persen pada akhir tahun 2007.

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,28 persen per tahun dalam periode lima tahun ke depan, tentunya diperlukan investasi yang tidak sedikit, baik bersumber dari pemerintah daerah sendiri, pemerintah pusat, masyarakat maupun dunia usaha. Sumber dana investasi ini tidak terbatas dari sumber dana dalam negeri yang biasanya berasal dari tabungan domestik maupun pinjaman domestik, melainkan tidak tertutup kemungkinan (dalam sistem perekonomian yang terbuka saat ini) sumber dana dari pinjaman luar negeri

Dengan target pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 5,28 persen per tahun, total nilai investasi yang dibutuhkan selama periode 2003-2007 diperkirakan akan mencapai Rp 516,29 triliun atau perlu disediakan dana sebesar Rp 103,26 triliun setiap tahunnya. Perhitungan ini didasarkan pada angka *Incremental Capital-Output Ratio (ICOR)* dengan besaran yang bergerak antara 4,5 - 5,5 (asumsi bahwa kegiatan ekonomi berjalan secara efisien). Rasio ini didasari pemikiran bahwa pembiayaan investasi juga akan semakin sulit karena (a) baik APBN maupun APBD diperkirakan tidak akan bertambah secara tajam karena pemulihan ekonomi yang mendorong potensi pajak dan retribusi belum dapat dicapai dalam satu atau dua tahun mendatang, (b) dunia usaha juga masih akan mengalami kesulitan dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan investasi, (c) tabungan masyarakat diperkirakan akan sedikit menurun karena pendapatan nyaris tidak bertambah sementara kebutuhan konsumsi terus meningkat karena kenaikan harga, (d) pinjaman luar negeri pemerintah maupun swasta akan bertambah sulit karena krisis kepercayaan luar negeri terhadap kemampuan Indonesia dalam mengembalikan pinjaman terutama dikaitkan dengan depresiasi rupiah, dan (e) penanaman modal asing akan tersendat karena keraguan investor asing atas berbagai krisis dan instabilitas yang dialami Indonesia.

Di bidang sosial-kemasyarakatan, kualitas kehidupan penduduk juga diharapkan akan lebih baik dan mulai memasuki tahap-tahap pemulihan. Seiring dengan bergeraknya kembali roda perekonomian, jumlah penduduk miskin diharapkan dapat terus ditekan di bawah 5 persen terhadap jumlah

penduduk keseluruhan, angka kematian bayi (IMR) menurun di bawah 20 per 1000 kelahiran mulai tahun 2004, angka harapan hidup (E_0) meningkat di atas 72 tahun, angka partisipasi sekolah SD menjadi 100 persen, angka partisipasi SLTP mencapai 95 persen dan SLTA mencapai 75 persen. Ini semua dapat dicapai bila struktur penduduk tidak banyak dipengaruhi oleh pendatang baru yang kebanyakan merupakan golongan usia kerja dengan pendidikan dan ketrampilan yang rendah.

Berkaitan dengan kemampuan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, diperkirakan bahwa kenaikan APBD DKI Jakarta untuk lima tahun kedepan akan tumbuh antara 10-15 persen per tahun sebagaimana pertumbuhan APBD selama ini. Namun demikian kenaikan APBD di atas 15 persen masih dimungkinkan apabila ada terobosan baru, seperti kenaikan luar biasa yang dialami pada tahun 2001 karena adanya penerapan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Perkiraan peningkatan APBD ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kinerja perekonomian akan jauh lebih baik yang memberi optimisme baru pada penerimaan daerah baik dari pajak dan retribusi maupun penerimaan non-pajak.

Di lain pihak kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka otonomi daerah akan terus diperbaiki dan memberi sinyal positif pada penguatan struktur keuangan daerah, terutama yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU). Dengan kebijakan pengeluaran anggaran yang lebih efisien dan efektif, serta berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas publik maka peningkatan penerimaan daerah akan memberi dampak stimulus lebih besar dalam peningkatan pelayanan masyarakat, pemulihan ekonomi, serta rehabilitasi prasarana dan sarana kota.

2.3. PERBANDINGAN DENGAN EKONOMI NASIONAL

Menilai perkembangan dan potensi ekonomi Propinsi DKI Jakarta sebagaimana yang digambarkan diatas, akan lebih lengkap lagi bila membandingkannya juga dengan ekonomi nasional atau rata-rata

perkembangan ekonomi di seluruh propinsi di Indonesia. Dengan kata lain prestasi rata-rata ekonomi seluruh propinsi di Indonesia digunakan sebagai patokan untuk mengukur apakah perkembangan ekonomi Propinsi DKI Jakarta tersebut, dapat dikatakan baik atau sebaliknya. Ekonomi Propinsi DKI Jakarta sendiri sebagai bagian dari ekonomi nasional, dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi nasional. Tetapi hal sebaliknya juga terjadi yaitu ekonomi nasional juga dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi Propinsi DKI Jakarta.

Pada bagian ini akan dilakukan Analisa “*Location Quotient*” (LQ), “*Revealed Comparative Advantage (RCA)*” dan Analisa “*Shift-Share*”.

2.3.2 **Analisa Location Quotient (LQ)**

Location Quotients (LQ) adalah angka yang menunjukkan tingkat keunggulan relatif suatu sektor di suatu daerah dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Angka LQ umumnya digunakan untuk menentukan sektor basis di suatu daerah. Angka LQ berkisar dari 0 sampai dengan positif tak terhingga. Angka LQ yang kurang dari 1 artinya bahwa sektor yang bersangkutan tidak memiliki keunggulan relatif. Angka LQ sama dengan satu mengindikasikan bahwa sektor yang bersangkutan memiliki keunggulan relatif yang sama dengan rata-rata semua daerah. Sedangkan angka LQ lebih besar dari 1 memiliki makna bahwa sektor yang bersangkutan memiliki keunggulan relatif yang lebih tinggi dari rata-rata.

Angka yang menunjukkan tingkat keunggulan relatif kegiatan lapangan usaha di Propinsi DKI Jakarta dicantumkan pada Tabel 2.1. Angka pada tabel menunjukkan bahwa lapangan usaha di Jakarta yang memiliki keunggulan relatif dibanding propinsi lainnya adalah yang bercirikan jasa-jasa. Sektor Listrik, Gas Kota dan Air Bersih merupakan lapangan usaha yang melakukan kegiatan jasa distribusi tenaga listrik, gas dan air bersih. Sektor bangunan adalah satu-satunya sektor yang bukan termasuk jasa, tetapi memiliki keunggulan relatif. Hal ini sebagai akibat dari permintaan bangunan dalam perekonomian memiliki porsi yang relatif besar dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya. Sektor yang dikategorikan sebagai sektor jasa yang berikutnya

dan memiliki keunggulan relatif adalah perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan. Di antara sektor-sektor jasa itu, yang memiliki keunggulan relatif paling besar adalah sektor keuangan, persewaan bangunan dan jasa perusahaan. Satu-satunya sektor lapangan usaha yang tidak memiliki keunggulan relatif adalah sektor jasa-jasa lainnya. Hal ini mudah dimengerti karena di dalamnya terdiri dari kegiatan pemerintahan dan jasa-jasa rumah tangga serta jasa-jasa sosial kemasyarakatan. Orientasi dari kegiatan sektor ini tidak ditekankan pada *profit*, melainkan pada pelayanan sosial.

Tabel 2.1.
Perhitungan LQ Berdasarkan PDRB Harga Konstan
Propinsi DKI Jakarta, Periode 1993-2000

Sektor Lapangan Usaha	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Pertanian	0.016	0.014	0.012	0.012	0.012	0.011	0.012	0.012
Industri Pengolahan	0.915	0.888	0.880	0.853	0.844	0.831	0.831	0.819
Listrik, Gas Dan Air Minum	1.505	1.454	1.332	1.241	1.250	1.282	1.260	1.232
Bangunan	1.929	1.952	1.994	2.031	2.100	1.924	1.907	1.818
Perdagangan, Hotel Dan Restoran	1.272	1.247	1.254	1.257	1.241	1.469	1.493	1.488
Pengangkutan Dan Komunikasi	1.263	1.207	1.193	1.190	1.195	1.286	1.391	1.379
Keuangan, Persewaan Bangunan & Jasa Perusahaan	2.839	2.812	2.765	2.746	2.671	3.135	3.217	3.215
Jasa-Jasa	1.046	1.031	1.014	0.985	0.951	0.942	0.945	0.955

Berdasarkan paparan di atas, maka kegiatan ekonomi yang harus dikembangkan di Jakarta adalah kegiatan yang tergolong lapangan usaha jasa-jasa. Sektor bangunan walaupun bukan termasuk lapangan usaha jasa, namun sektor ini akan berkembang mengikuti arah perkembangannya sektor jasa-jasa. Oleh karena itu sudah tepat bahwa salah satu misi pembangunan Propinsi DKI Jakarta adalah untuk mengembangkan Jakarta sebagai Kota Jasa skala nasional dan internasional. Pengembangan sektor jasa akan memberikan dampak positif terhadap aspek lingkungan. Berbagai macam polusi seperti polusi air tanah, udara dan kebisingan dapat diminimumkan.

2.3.2 Revealed Comparative Advantage (RCA)

Angka RCA pada Tabel 2.2 menggambarkan keunggulan relatif komoditas ekspor yang dikirim dari Propinsi DKI Jakarta. Angka RCA rata-rata selama kurun 1995-2000 disediakan pada kolom terakhir. Angka RCA yang

lebih besar dari satu menggambarkan bahwa komoditas tersebut memiliki keunggulan relatif dibanding dengan pengiriman ekspor dari daerah-daerah lain pada umumnya. Semakin besar RCA semakin memiliki keunggulan relatif.

Namun perlu dibaca secara hati-hati, bahwa komoditas-komoditas yang tercantum pada Tabel 2.2 tidak semuanya diproduksi di Jakarta. Boleh jadi komoditas ekspor tersebut diproduksi di luar DKI, terutama dari Propinsi Jawa Barat dan Banten. Sehingga keunggulan relatif komoditas ekspor yang dimuat melalui pelabuhan di Propinsi DKI Jakarta, tidak secara otomatis menjadi komoditas yang memiliki keunggulan dalam sisi produksi. Keunggulan relatif disini lebih disebabkan oleh kemampuan Jakarta dalam memberikan pelayanan dalam kegiatan ekspor. Hal ini disebabkan oleh tersedianya pelabuhan berkapasitas besar dan dukungan jasa-jasa lainnya yang terkait dengan kegiatan ekspor.

Pesan yang ingin disampaikan melalui angka RCA adalah untuk menunjukkan bahwa Propinsi DKI Jakarta memiliki keunggulan yang relatif lebih tinggi pada bidang jasa atau pelayanan dalam memfasilitasi kegiatan ekspor. Fakta ini untuk memperkuat alasan bahwa memang Propinsi DKI Jakarta sudah sepantasnya dijadikan kota jasa berskala nasional maupun internasional.

Tabel 2.2
Perhitungan RCA > 1.00, Menurut SITC 3 digit
Periode 1995 – 2000

No.	SITC3	DESKRIPSI	1995	1996	1997	1998	1999	2000	Rata-2
1	531	BAHAN PEWARNA SINTETIS	3.23	3.19	3.04	2.73	3.13	2.86	3.03
2	783	MOTOR PENGANGKUTAN JALAN RAYA	3.26	3.20	3.06	2.74	3.05	2.84	3.02
3	572	POLIMER DARI STIRENA, BENTUK AWAL	3.18	3.15	2.94	2.70	3.17	2.90	3.01
4	746	BANTALAN PELURU ATAU BANTALAN GILING	3.23	3.20	3.02	2.58	3.08	2.90	3.00
5	571	POLIMER DARI ETILENA, BENTUK AWAL	3.25	3.18	2.95	2.70	3.06	2.69	2.97

6	873	ALAT-ALAT METERAN DAN HITUNG	3.21	3.03	2.79	2.72	3.17	2.77	2.95
7	266	SERAT BUATAN UNTUK DIPINTAL	3.18	3.10	2.91	2.64	3.05	2.76	2.94
8	781	KENDARAAN BERMOTOR UNTUK PENUMPANG.	3.23	3.12	2.89	2.61	2.98	2.77	2.93
9	693	KAWAT DAN PRODUK IKUTANNYA	3.04	3.10	3.04	2.71	3.01	2.71	2.93
10	573	POLIMER DARI VINIL CHLORIDA	3.17	3.09	3.02	2.70	2.89	2.48	2.89
11	895	PERLENGKAPAN KANTOR LAINNYA	3.21	3.10	2.93	2.74	2.69	2.66	2.89
12	574	POLIASETAL,KEC.POLIETER & DAMAR EPOKSID	3.20	3.11	2.91	2.62	2.86	2.61	2.88
13	792	ALAT PENGANGKUTAN UDARA &PERLENGKAPANNYA	3.25	3.20	3.00	2.52	2.46	2.70	2.85
14	762	ALAT PENERIMA GELOMBANG SUARA	3.17	2.95	2.84	2.42	2.92	2.81	2.85
15	655	BAHAN SULAMAN ATAU RAJUTAN	3.14	3.15	2.90	2.63	2.71	2.56	2.85
16	845	BARANG BARANG LAINNYA DARI TEKSTIL	3.09	3.04	2.84	2.63	2.87	2.63	2.85
17	882	BAHAN UNTUK FOTOGRAFI/FILM.	3.09	3.18	2.70	2.56	2.79	2.70	2.84
18	681	PERAK,PLATINA DAN YG SEMACAMNYA	3.17	3.11	2.97	2.75	3.15	1.74	2.82
19	748	POROS PENGGERAK,ENKOL&LANDASAN BANTALAN	2.79	3.01	2.72	2.71	2.92	2.73	2.81
20	881	APARAT FOTOGRAFI DAN PERLENGKAPANNYA	3.25	3.18	3.03	2.69	2.95	1.77	2.81
21	713	MESIN PISTON PEMBAKARAN DALAM & BAGIAN.	3.12	3.10	2.86	2.57	2.58	2.62	2.81
22	971	EMAS BUKAN UNTUK MONETER	2.57	2.88	2.97	2.60	3.11	2.68	2.80
23	261	SUTERA DAN SISA-SISA SUTERA	3.26	2.33	3.06	2.38	3.15	2.55	2.79
24	843	PAKAIAN LELAKI & ANAK LELAKI, RAJUTAN	3.14	3.07	2.82	2.46	2.67	2.52	2.78
25	657	BENANG & KAIN TEKSTIL KHUSUS&PRODUKNYA	3.05	2.96	2.86	2.54	2.80	2.45	2.78
26	073	HASIL OLAHAN COKLAT	2.98	2.76	2.90	2.61	2.75	2.59	2.76
27	533	BAHAN PEWARNA LAINNYA	2.97	3.00	2.84	2.27	2.85	2.39	2.72
28	844	PAKAIAN WANITA & ANAK WANITA, RAJUTAN	2.95	2.86	2.67	2.55	2.75	2.54	2.72
29	575	BAHAN PLASTIK LAINNYA, DALAM BENTUK AWAL	2.74	2.96	2.72	2.55	2.65	2.30	2.65
30	841	PAKAIAN LELAKI&ANAK LELAKI BKN RAJUTAN	2.92	2.90	2.66	2.39	2.62	2.40	2.65
31	062	KEMBANG GULA	2.72	2.71	2.69	2.41	2.84	2.43	2.63
32	749	BAGIAN &PERLENGKAPAN MESIN BUKAN LISTRIK	3.01	2.76	2.84	2.44	2.54	2.16	2.62
33	232	GETAH KARET SINTETIS,KARET SINTETIS	2.98	2.06	2.23	2.50	3.13	2.76	2.61
34	742	POMPA UNTUK BARANG CAIR	2.82	3.06	2.69	1.91	2.72	2.28	2.58
35	656	TULE,KAIN BELUDRU DSB.	3.10	3.10	2.90	2.63	2.16	1.48	2.56
36	842	PAKAIAN WANITA&ANAK WANITA BKN RAJUTAN	2.74	2.68	2.48	2.34	2.63	2.46	2.55
37	581	TABUNG, PIPA & SELANG DR BAHAN PLASTIK	3.23	3.12	2.03	1.28	3.00	2.61	2.54
38	553	KOSMETIKA	2.61	2.59	2.45	2.36	2.71	2.55	2.54
39	048	OLAHAH GANDUM DAN TEPUNG LAINNYA	2.78	2.79	2.44	1.90	2.87	2.48	2.54
40	625	BAN LUAR & DALAM,UNTUK SEGALA JENIS RODA	2.62	2.72	2.43	2.30	2.69	2.45	2.53
41	678	KAWAT DARI BESI ATAU BAJA	2.26	2.46	2.20	2.59	2.86	2.68	2.51
42	541	BAHAN OBAT-OBATAN DAN KESEHATAN	2.38	2.69	2.66	2.56	2.83	1.90	2.50
43	542	OBAT-OBATAN (TERMASUK OBAT HEWAN)	2.78	2.74	2.64	2.04	2.51	2.25	2.49
44	714	MESIN DAN MOTOR BUKAN LISTRIK,BAGIAN TDS	3.26	3.20	2.00	1.18	2.98	2.30	2.48
45	831	PERALATAN BEPERGIAN,TAS TANGAN DLL	2.67	2.71	2.40	2.06	2.55	2.39	2.46
46	677	REL-REL&PERLENGKAPANNYA DARI BESI/BAJA	2.66	3.03	2.90	1.63	2.19	2.32	2.46
47	613	KULIT BERBULU	3.26	3.20	3.03	0.46	2.67	2.10	2.45
48	666	BARANG PORSELIN DAN PECAH BELAH LAINNYA	2.55	2.50	2.25	2.45	2.65	2.27	2.44
No.	SITC3	DESKRIPSI	1995	1996	1997	1998	1999	2000	Rata-2
49	851	SEPATU DAN PERALATAN KAKI LAINNYA	2.57	2.57	2.50	2.18	2.55	2.20	2.43
50	683	BARANG-BARANG NIKEL	3.02	0.24	3.05	2.76	2.61	2.90	2.43
51	723	MESIN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI,TDS.	2.33	2.10	2.52	2.51	2.66	2.39	2.42
52	633	BARANG-BARANG GABUS	3.24	3.19	2.43	2.76	1.58	1.24	2.41
53	267	SERAT BUATAN LAINNYA UNTUK DIPINTAL	2.30	2.19	2.20	2.05	2.76	2.73	2.37
54	724	MESIN UTK MENERJAKAN TEKSTIL DAN KULIT	2.39	2.71	2.57	1.94	2.37	2.25	2.37
55	786	KERETA GANDENGAN & KEND.LAIN,TDK.BERMOT.	3.17	3.19	2.81	2.22	1.73	1.08	2.37
56	846	PERLENGKAPAN PAKAIAN DARI KAIN TEKSTIL	2.59	2.53	2.35	2.39	2.26	2.08	2.37
57	112	MINUMAN MENGANDUNG ALKOHOL	1.48	2.35	2.50	2.20	3.02	2.55	2.35

58	653	KAIN TENUNAN DARI SERAT BUATAN	2.96	2.90	2.80	2.33	1.72	1.36	2.35
59	629	BARANG-BARANG KARET, TDS	2.46	2.09	2.22	2.29	2.46	2.55	2.35
60	731	MESIN PERKAKAS,BKJA PINDAHKAN BRG LAIN	2.35	1.94	2.13	2.55	2.82	2.27	2.34
61	761	ALAT PENERIMA GAMBAR (TERMASUK VIDEO)	2.17	1.72	2.08	2.37	2.88	2.84	2.34
62	579	SISA BAHAN PLASTIK	2.53	2.74	1.41	2.33	2.70	2.33	2.34
63	017	DAGING,KALENGAN ATAU OLAHAN	3.26	3.20	2.91	2.31	0.98	1.27	2.32
64	782	KENDARAAN BERMOTOR UNTUK BARANG	3.26	2.51	2.23	2.48	1.60	1.80	2.31
65	651	BENANG TEKSTIL	2.50	2.55	2.48	2.23	2.20	1.86	2.30
66	654	KAIN TENUNAN-LAINNYA	2.90	3.00	2.69	2.41	1.57	1.23	2.30
67	554	SABUN DAN BAHAN PEMBERSIH LAINNYA	2.17	2.40	2.32	2.16	2.58	1.99	2.27
68	735	BAGIAN DAN PERLENGKAPAN MESIN PERKAKAS	2.97	2.14	0.79	2.62	2.19	2.79	2.25
69	074	T E H	2.25	2.27	2.28	2.14	2.32	2.07	2.22
70	733	MESIN PERKAKAS UNTUK LOGAM	1.85	1.60	2.62	2.47	2.45	2.31	2.22
71	662	BARANG KONSTRUKSI	2.19	1.92	2.17	2.11	2.61	2.23	2.21
72	727	MESIN UNT.INDUSTRI PENGOLAHAN MAKANAN	2.18	2.65	2.65	2.48	1.20	1.64	2.13
73	582	PELAT, LEMBARAN, FILM & FOIL DR PLASTIK	2.16	2.14	2.16	1.92	2.40	1.97	2.12
74	898	ALAT MUSIK DAN PERLENGKAPANNYA	2.44	1.97	2.55	2.01	1.70	1.97	2.11
75	667	MUTIARA DAN BATU PERMATA	2.26	2.39	1.94	1.86	2.14	1.85	2.07
76	784	BAGIAN &PERLENGKAPAN KENDARAAN BERMOTOR	1.70	1.61	2.42	1.88	2.45	2.38	2.07
77	899	BARANG-BARANG BUATAN PABRIK LAINNYA	2.12	2.11	1.97	1.84	2.29	1.96	2.05
78	211	JANGAT DAN KULIT BELUM DISAMAK	3.04	2.08	2.41	1.31	2.22	1.22	2.05
79	664	KACA / GELAS	2.37	2.18	2.30	1.65	1.80	1.94	2.04
80	023	MENTEGA,LEMAK & MINYAK LAINNYA DR SUSU	3.26	2.26	2.98	0.38	0.76	2.59	2.04
81	591	OBAT PEMBASMI KUMAN,SERANGGA,CENDAWAN DS	3.01	2.11	2.05	1.62	1.82	1.60	2.03
82	743	POMPA UNTUK LAINNYA DAN KOMPRESOR	2.27	2.59	1.89	0.97	2.02	2.32	2.01
83	282	SISA-SISA BESI BAJA	2.27	2.27	2.38	2.06	1.50	1.58	2.01
84	699	PRODUK LOGAM TIDAK MULIA,LAINNYA	2.36	2.40	2.00	1.92	1.39	1.93	2.00
85	263	SERAT KAPAS	2.40	1.68	2.04	1.99	2.26	1.58	1.99
86	674	BESI LEMBARAN, DISEPUH	0.74	1.12	2.87	1.98	2.00	2.86	1.93
87	513	ASAM POLIKARBOKSIL DAN ANHIDRANYA	2.79	2.26	1.52	1.98	1.69	1.32	1.93
88	721	MESIN PERTANIAN DAN PERLENGKAPANNYA	1.50	1.59	1.88	2.28	2.68	1.61	1.92
89	022	SUSU,KEP.SUSU&HASILNYA KEC.MENTEGA&KEJU	3.09	3.00	1.77	0.64	0.69	2.18	1.89
90	791	KERETA API DAN TREM	1.63	2.87	2.40	0.34	2.38	1.60	1.87
91	763	PESAWAT PEREKAM SUARA/GAMBAR	2.08	1.80	1.54	1.38	1.78	2.62	1.86
92	752	MESIN OTOMATIS PENGOLAH DATA &SATUANNYA	2.46	2.60	2.44	0.82	0.97	1.87	1.86
93	269	PAKAIAN DAN BARANG TEKSTIL BEKAS	1.48	1.94	1.31	2.09	2.17	1.95	1.82
94	583	BAHAN PLASTIK DALAM BENTUK MONOFIL	2.20	1.11	1.96	0.08	2.74	2.85	1.82
95	894	KERETA BAYI,MAINAN ANAK-ANAK DLL .	1.84	1.69	2.09	1.90	1.45	1.76	1.79
96	692	TANGKI UNTUK PENYIMPANAN/PENGAKUTAN BRG	1.96	1.88	2.23	1.72	1.62	1.31	1.78
97	025	T E L U R	3.07	0.28	0.79	2.73	2.31	1.28	1.74
98	773	ALAT PENGATUR,PEMBAGI ARUS LISTRIK	2.12	2.07	1.54	1.21	1.76	1.72	1.74
99	695	PERKAKAS PERTUKANGAN TANGAN	1.78	0.90	1.86	1.86	2.22	1.77	1.73
100	848	BARANG & PERLENGK.PAKAIAN,BUKAN TEKSTIL	2.47	1.99	1.57	1.06	1.50	1.78	1.73
101	665	BARANG-BARANG KACA	1.60	1.84	1.44	1.73	2.10	1.66	1.73
No.	SITC3	DESKRIPSI	1995	1996	1997	1998	1999	2000	Rata-2
102	652	KAIN TENUNAN,KAPAS	2.23	2.09	1.70	1.34	1.45	1.31	1.69
103	268	WOOL DAN BULU HEWAN LAINNYA	1.17	2.95	2.36	0.00	2.41	1.20	1.68
104	726	MESIN CETAK DAN MESIN JILID BUKU	0.29	0.96	1.36	2.40	2.31	2.69	1.67
105	658	BARANG TEKSTIL JADI LAINNYA	1.94	1.70	1.56	1.56	1.71	1.49	1.66
106	024	KEJU DAN DADIH SUSU	0.00	2.76	0.64	2.41	1.87	2.22	1.65
107	712	TURBIN UAP & TURBIN PEMBANGKIT LAINNYA	1.78	1.91	1.67	1.13	1.28	2.12	1.65
108	612	BARANG-BARANG KULIT	0.98	1.67	2.29	0.69	1.95	2.10	1.61
109	659	PERMADANI DAN SEMACAMNYA	1.78	1.34	1.85	1.67	1.63	1.28	1.59

110	411	MINYAK DAN LEMAK HEWANI	1.82	1.70	2.25	0.17	2.20	1.40	1.59
111	778	ALAT LISTRIK LAINNYA	1.95	1.98	1.32	1.27	1.42	1.49	1.57
112	883	FILM SINEMATOGRAFI,SUDAH DICUCI/DISINARI	0.00	3.20	3.06	0.00	0.21	2.91	1.56
113	785	SEPEDA MOTOR,SPD.KUMBANG DAN SEPEDA LAIN	1.41	1.43	1.19	1.55	1.93	1.72	1.54
114	265	SERAT TUMBUH-TUMBUHAN LAINNYA	1.77	1.30	1.79	0.51	1.12	2.74	1.54
115	741	APARAT PEMANAS DAN PENDINGIN & ALAT2NYA	0.94	1.21	0.98	2.02	2.13	1.88	1.53
116	694	PAKU, MUR, BAUT DAN SEMACAMNYA	2.15	1.08	1.82	1.91	0.96	1.01	1.49
117	691	BANGUNAN DAN BAGIAN BANGUNAN	1.47	1.46	1.01	1.25	1.89	1.77	1.47
118	728	MESIN LAINNYA UNTUK INDUSTRI TERTENTU	0.35	1.06	2.06	2.11	1.80	1.41	1.46
119	641	KERTAS DAN KERTAS KARTON	1.18	1.33	1.54	1.64	1.61	1.40	1.45
120	598	BAHAN KIMIA LAINNYA,TDS	1.29	1.37	1.23	1.70	1.28	1.77	1.44
121	621	BAHAN-BAHAN DARI KARET	0.88	1.60	1.00	1.21	2.54	1.37	1.43
122	771	MESIN PEMBANGK.TENAGA,DIGERAKKAN LISTRIK	1.61	1.18	1.13	1.25	1.25	2.12	1.42
123	893	BARANG-BARANG PLASTIK BUATAN	1.61	1.66	1.25	1.17	1.41	1.33	1.41
124	672	INGOT BESI BAJA	0.68	0.71	0.37	1.91	3.06	1.57	1.38
125	111	MINUMAN TAK MENGANDUNG ALKOHOL	1.27	1.83	1.35	0.68	1.74	1.31	1.36
126	597	HASIL TAMBAHAN DR OLAHAN MINYAK MINERAL	2.97	2.77	0.24	0.40	0.71	1.01	1.35
127	871	ALAT OPTIS DAN PERLENGKAPANNYA	0.30	2.12	0.11	0.65	2.49	2.13	1.30
128	921	BARANG BARANG KIRIMAN	0.00	0.00	2.05	1.71	1.54	2.46	1.29
129	896	BARANG-BARANG SENI & ANTIK	0.93	1.21	2.02	0.84	1.52	1.17	1.28
130	098	HASIL OLAHAN YANG DAPAT DIMAKAN,TDS.	1.42	1.45	1.43	0.80	1.16	1.29	1.26
131	696	PISAU DAN ALAT POTONGAN LAINNYA	1.12	1.20	1.04	0.86	1.26	1.62	1.18
132	278	BAHAN MINERAL LAINNYA	1.23	1.22	1.02	0.75	1.34	1.44	1.17
133	874	ALAT PENGUKUR,PEMERIKSA & MENGAWASI	1.08	0.83	1.00	1.22	1.00	1.78	1.15
134	744	MESIN BONGKAR MUAT BARANG	0.95	0.53	1.58	1.06	1.57	1.12	1.14
135	725	MESIN UNTUK MENGERJAKAN PULP & KERTAS	0.49	0.48	0.43	2.03	1.50	1.88	1.14
136	611	KULIT DISAMAK	1.61	1.49	1.02	0.65	1.01	1.02	1.13
137	775	ALAT KEPERLUAN RUMAH TANGGA,LISTRIK/TIDA	1.04	1.17	0.74	0.86	1.43	1.45	1.12
138	516	KIMIA ORGANIK LAINNYA	0.77	2.27	0.82	0.54	1.12	1.14	1.11
139	772	ALAT PENYAMBUNG/PEMUTUS ARUS LISTRIK	1.82	1.59	0.85	0.76	0.55	1.04	1.10
140	288	SISA LOGAM TIDAK MENGANDUNG BESI	0.56	0.88	1.22	1.12	1.62	1.20	1.10
141	523	GARAM LOGAM&PEROKSIDA DR ASAM ANORGANIK	0.44	1.25	1.48	0.67	1.02	1.62	1.08
142	745	PERKAKAS TANGAN & MESIN BUKAN LISTRIK	0.54	0.60	0.67	1.83	1.55	1.21	1.07
143	776	TABUNG THERMIONIS,KATODA DINGIN,KAT.FOTO	1.32	1.53	1.12	0.49	0.16	1.71	1.05
144	661	SEMEN,KAPUR & BHN BANGUNAN BUATAN PABRIK	1.33	0.90	0.67	1.18	1.12	1.07	1.05
145	911	BARANG BARANG KIRIMAN	0.00	0.00	0.00	0.00	3.19	2.91	1.02

2.3.3 Analisa Shift-Share

Analisa shift-share adalah suatu teknik yang digunakan untuk menganalisa data statistik regional, baik berupa pendapatan per kapita, output, tenaga kerja maupun data lainnya. Metode ini juga digunakan untuk mengamati struktur pasar perekonomian daerah dan perubahannya secara deskriptif dengan cara menekankan pada bagian-bagian pertumbuhan sektor atau industri di daerah, dan memproyeksikan kegiatan ekonomi di daerah tersebut dengan data yang terbatas.

Dalam Analisa ini, pertumbuhan kegiatan di suatu daerah pada

dasarnya ditentukan oleh tiga hal, yaitu:

1. *National Share/National Growth Effect (N)*, yaitu pertumbuhan daerah dibandingkan dengan pertumbuhan nasional. Jika daerah tumbuh seperti rata-rata nasional, maka peranannya terhadap nasional akan tetap.
2. *Proportional Shift/Sectoral Mix Effect/Composition Shift (M)*, yaitu perbedaan pertumbuhan daerah dengan menggunakan pertumbuhan nasional sektoral dan pertumbuhan daerah dengan menggunakan pertumbuhan nasional total. Daerah dapat tumbuh lebih cepat/lambat daripada rata-rata nasional jika mempunyai sektor/industri yang tumbuh lebih cepat/lambat dari nasional. Dengan demikian perbedaan laju pertumbuhan dengan nasional disebabkan oleh komposisi sektoral yang berbeda.
3. *Differential Shift/Regional Share/Competitive Effect(S)*, yaitu perbedaan antara pertumbuhan daerah secara aktual dengan pertumbuhan daerah jika menggunakan pertumbuhan sektoral nasional. Daerah dapat saja mempunyai keunggulan komparatif dibandingkan dengan daerah lain, karena lingkungannya mendorong suatu sektor tertentu untuk tumbuh lebih cepat. Lingkungan disini dapat berarti lahan, tenaga kerja, maupun keahlian tertentu.

Berdasarkan keadaan di atas, maka dibuatkan perumusan shift share secara kuantitatif. Pertumbuhan daerah pada dasarnya dipengaruhi oleh share nasional, proporsional shift dan differensial shift atau

$$R = N + M + S$$

Dimana

R = perubahan total dalam output daerah

N = Share nasional

M = Proportional Shift/Sectoral Mix

S = Differential Shift/share daerah

Jika M dan S positif, menunjukkan bahwa komposisi kegiatan di daerah sudah baik untuk daerah yang bersangkutan. Sebaliknya, jika M negatif atau S negatif menunjukkan bahwa komposisi kegiatan belum cukup baik, namun masih mungkin ditingkatkan dengan membandingkannya dengan komposisi nasional.

Dalam menentukan komoditas unggulan, maka komponen S dan M ini akan digunakan sebagai kriteria kinerja komoditas pada tahap pertama. Komponen M yang positif menunjukkan keunggulan komoditas tertentu dibandingkan dengan komoditas serupa di daerah lain, sedangkan komponen S yang positif menunjukkan komposisi industri yang sudah relatif baik dibandingkan dengan nasional.

Analisa *shift-share* dalam bahasan ini diterapkan untuk menganalisa pergeseran peran pendapatan regional sektoral di DKI Jakarta. Tabel 2.3 memuat angka-angka proses dan hasil perhitungan Analisa Shift-share.

Tabel 2.3
Analisa Shift-Share PDRB Menurut Sektor
Propinsi DKI Jakarta, Periode 1990-2000

Sektor Lapangan Usaha	DKI Jakarta (milyar rp)		Nasional (Milyar Rp)		Nasio nal	Pertumbuhan		N	M	S	R	
	1990	2000	1990	2000		Total	Nasional					Daerah
							Sektoral					Sektoral
Pertanian	191	116	53654	66088	1.474	1.232	0.607	90	-46	-119	-75	
Pertambangan dan Penggalian	0	0	28508	38730	1.474	1.359	0.000	0	0	0	0	
Industri Pengolahan	8526	12875	55725	105103	1.474	1.886	1.510	4042	3513	-3206	4349	
Listrik, Gas dan Air Minum	702	1226	2336	6650	1.474	2.847	1.746	333	964	-773	524	

Bangunan	4206	6470	16289	23247	1.474	1.427	1.538	1994	-197	468	2264
Perdagangan, Hotel dan Restoran	9223	14166	44936	63449	1.474	1.412	1.536	4372	-572	1143	4943
Pengangkutan dan Komunikasi	3271	6042	17832	29284	1.474	1.642	1.847	1551	550	670	2771
Keuangan,sewa bangunan & jasa perusahaan	9198	13168	21122	27383	1.474	1.296	1.432	4360	-1634	1243	3970
Jasa-jasa	4791	5429	29561	38002	1.474	1.286	1.133	2271	-903	-729	639
Total	40108	59492	269962	397934	1.474	1.474	1.483	19013	1675	-1303	19384

Angka-angka pada Tabel 2.3 menunjukkan bahwa selama periode 1990-2000, semua sektor di Propinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan pendapatan, kecuali sektor pertanian (lihat kolom R). Dalam kurun waktu itu, pendapatan meningkat sebesar Rp 19.384 milyar, yang dihitung menurut harga konstan 1993.

Yang menarik diperhatikan adalah kolom S, yaitu kolom yang berisi pergeseran andil atau share daerah. Angka negatif menandakan bahwa sektor mengalami peran atau andil relatif yang berkurang atau mundur. Sebaliknya angka positif menunjukkan bahwa peran sektor di Propinsi DKI Jakarta mengalami peran relatif yang menaik. Pendapatan sektor pertanian, industri pengolahan, listrik-gas-dan air bersih, dan jasa-jasa mengalami perkembangan andil relatif yang menurun selama periode 1990-2000. Sebaliknya sektor bangunan, perdagangan-hotel-dan-restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan-sewa bangunan-dan jasa perusahaan mengalami andil relatif yang meningkat selama periode itu.

Kemudian kita perhatikan kolom M yaitu kolom yang menunjukkan pola pergeseran peran pendapatan sektoral pada tingkat nasional. Angka negatif menandakan perkembangan andil pendapatan sektor lebih kecil daripada perkembangan pendapatan nasional secara rata-rata. Sedangkan angka positif menggambarkan andil perkembangan pendapatan sektor lebih tinggi daripada perkembangan pendapatan nasional secara rata-rata.

Sektor industri pengolahan, listrik-gas-air bersih, dan angkutan dan komunikasi memberikan andil pendapatan yang semakin besar secara nasional pada periode 1990-2000. Sedangkan andil pendapatan Pertanian, bangunan, perdagangan dan restoran, keuangan, sewa bangunan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa secara nasional mengalami kemunduran selama periode

1990-2000.

Pada tingkat nasional sektor bangunan memberikan andil yang menurun, padahal di Propinsi DKI Jakarta mengalami andil yang semakin menaik. Hal ini berlaku pula sektor-sektor perdagangan dan restoran, keuangan-sewa bangunan dan jasa perusahaan.

Pada tingkat nasional industri manufaktur dan listrik-gas & air bersih mengalami andil pendapatan yang semakin menaik, sedangkan di Jakarta andilnya semakin menurun. Peran pendapatan sektor angkutan dan komunikasi baik di tingkat nasional maupun Propinsi DKI Jakarta sama-sama meningkat. Sebaliknya sektor pertanian dan jasa-jasa peran pendapatannya sama-sama menurun baik di tingkat nasional maupun di Propinsi DKI Jakarta.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas adalah bahwa sektor konstruksi dan sektor-sektor ekonomi berbasis jasa (yaitu perdagangan, hotel dan restoran, angkutan dan transportasi, keuangan-sewa bangunan dan jasa perusahaan) di Jakarta pada masa yang akan datang akan memberikan andil pendapatan yang semakin meningkat.

2.4. TANTANGAN DAN PERMASALAHAN PROPINSI DKI JAKARTA

Jakarta dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Begitu pula tantangan dan permasalahan yang dihadapi. Pembangunan Propinsi DKI Jakarta masih menyisakan aneka persoalan di berbagai bidang kehidupan warga kota, baik sosial, ekonomi maupun menyangkut sarana prasarana kota dan tata pemerintahan. Semua masalah itu hanya dapat dicarikan solusinya dengan tepat apabila mampu mengenalinya dengan teliti dan jeli. Berdasarkan data dari hasil jajak pendapat dan evaluasi hasil forum pengkajian, tantangan pembangunan Propinsi DKI Jakarta di masa mendatang meliputi:

2.4.1. Tantangan di bidang Sosial

Masalah sosial merupakan hasil dari proses perkembangan masyarakat dalam penyesuaian diri terhadap perubahan-perubahan yang menimbulkan problema sosial, yaitu ketidaksesuaian antar unsur-unsur dalam masyarakat yang dapat mengganggu tertib sosial. Problema sosial biasanya

sangat dimensional, namun yang menonjol dan memerlukan perhatian adalah:

1. Dampak urbanisasi yang belum terkendali

Urbanisasi yang terus menerus berlangsung menyebabkan ketidakseimbangan tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia, dan ketidakseimbangan penduduk dengan daya dukung fasilitas perkotaan. Kualitas sumber daya pendatang tidak sesuai dengan kebutuhan kota. Implikasinya adalah meningkatnya pengangguran, semakin meluasnya permukiman kumuh dan padat, kesenjangan antar penduduk, sektor informal yang tidak terkendali dan meningkatnya kejahatan.

2. Kesenjangan dan konflik sosial yang masih tinggi

Kesenjangan adalah masalah kota yang cukup menonjol, baik kesenjangan antar golongan penduduk yang tampak dari distribusi pendapatan, maupun kesenjangan antar sektor ekonomi yang tampak dari kesenjangan produktivitas, akses terhadap pasar, akses terhadap modal dan manajemen. Kesenjangan yang semakin meluas pasca krisis ekonomi telah menimbulkan eksese disharmoni sosial yang mengarah pada konflik antar golongan penduduk.

3. Peran aktif kelembagaan masyarakat yang belum optimal

Kegagalan lembaga-lembaga kemasyarakatan menjalankan peranan dalam memelihara keselarasan sosial, menjaga moralitas dan harmoni sosial, tampak dari semakin maraknya konflik antar warga kota, tawuran pelajar dan berbagai bentuk gangguan ketentraman sosial lainnya. Akumulasi masalah-masalah perkotaan dan kealpaan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam menjalankan peranannya secara bertanggung jawab menyebabkan eskalasi gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban menjadi semakin meluas.

4. Pengguna narkoba, judi, prostitusi dan PMKS

Kasus penyalahgunaan narkoba telah meluas ke berbagai lapisan masyarakat dan dunia pendidikan dan mencapai semua tingkat pendidikan.

Seperti fenomena gunung es, kasus yang tampak hanya kecil (hanya 10 persen dari mereka yang menyalahgunakan narkoba mencari pengobatan ke rumah sakit). Penyalahgunaan narkoba yang semakin marak telah menimbulkan banyak korban dan mengancam masa depan bangsa. Kecenderungan yang sama juga tampak dalam kasus perjudian dan prostitusi terutama pada masyarakat lapisan bawah yang kemudian menimbulkan eksekutif melemahkan etos kerja dan meningkatnya kejahatan. Meningkatnya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang tampak dari banyaknya gelandangan, pengemis, pengamen dan sebagainya, memperburuk wajah kota dan begitu pula gangguan keamanan dan ketertiban telah menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan dan kekhawatiran warga kota.

5. *Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang belum merata*

Kesenjangan distribusi pendapatan berimplikasi pada aksesibilitas warga kota untuk memperoleh kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan. Tingkat pendidikan yang rendah dan derajat kesehatan yang buruk dari sebagian warga kota tercermin dari kualitas kehidupan masyarakat dan wajah fisik kota, dan juga berkorelasi secara positif dengan masalah-masalah sosial kota.

2.4.2. Tantangan di bidang Ekonomi

Perkembangan ekonomi di Propinsi DKI Jakarta tidak terlepas dari situasi ekonomi nasional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 yang diawali dengan depresiasi mata uang rupiah terhadap dolar AS, telah membawa implikasi buruk pada perekonomian Indonesia. Inflasi yang tinggi, suku bunga bank yang meningkat mengakibatkan merosotnya kinerja lapangan usaha di sektor riil. Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi merasakan dampak krisis ekonomi yang besar dibanding daerah lainnya, bahkan mengalami kontraksi yang sangat tajam dengan pertumbuhan minus 17,49 persen pada tahun 1998, dengan tingkat inflasi yang sangat tinggi sebesar 74,4 persen. Peristiwa Mei 1998 yang mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana kota, memperburuk perekonomian Jakarta. Masalah perekonomian

tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pemulihan perekonomian daerah yang belum optimal

Dampak terganggunya stabilitas adalah merosotnya kepercayaan investor, terutama investor asing dalam melakukan investasi di Indonesia. Demikian juga gejolak politik sangat mempengaruhi stabilitas keamanan dan mengganggu pemulihan ekonomi. Kebijakan nasional yang berubah-ubah sebagai akibat perubahan-perubahan pimpinan nasional yang berlangsung dengan cepat, menyebabkan iklim tidak kondusif untuk upaya meningkatkan kinerja ekonomi daerah. Meskipun pada tahun 2000, perekonomian Jakarta mulai bangkit dengan pertumbuhan positif (3,98 persen), kemudian meningkat menjadi 3,64 persen pada tahun 2001 dengan pertumbuhan yang relatif stabil, tetapi pertumbuhan itu belum mampu meningkatkan lapangan kerja secara berarti.

2. Pedagang kaki lima yang belum terkendali

Krisis ekonomi dan urbanisasi menyebabkan banyaknya penduduk kota bekerja pada sektor informal, terutama pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima yang meningkat dengan sangat pesat dan keterbatasan daya tampung ruang yang tersedia di pasar atau pusat perbelanjaan, menyebabkan pedagang kaki lima mengambil tempat di emperan toko, di trotoar, badan jalan atau di berbagai fasilitas umum lainnya. Keberadaan mereka di tempat yang tidak semestinya telah mengganggu kepentingan dan ketertiban umum dan seringkali menimbulkan masalah-masalah sosial baru, seperti gangguan terhadap lalu lintas, sampah yang tidak terkendali, perlawanan terhadap upaya penertiban dan meningkatnya kriminalitas.

3. Partisipasi usaha kecil, menengah dan koperasi belum optimal

Persaingan dunia usaha yang semakin ketat antar pelaku ekonomi, menuntut kemampuan untuk memiliki daya saing yang berkelanjutan (*sustainable competitive advantage*). Kemampuan usaha kecil, menengah dan koperasi dalam memperebutkan pasar yang semakin kompetitif sangat terbatas. Pengelolaan usaha belum efektif sehingga tidak mampu bersaing

dengan kompetitor besar atau kompetitor asing. Keterbatasan akses pasar, keterbatasan akses pada sumber-sumber permodalan, dan keterbatasan manajemen menjadi hambatan dalam pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi.

4. Pengangguran dan kemiskinan

Laju pertumbuhan angkatan kerja yang jauh melampaui laju pertumbuhan kesempatan kerja mengakibatkan tingginya angka pengangguran di Jakarta yaitu tahun 2000 sebanyak 12,08 persen, kemudian tahun 2001 menjadi 11,32 persen. Daya serap lingkungan kerja yang belum membaik akibat krisis ekonomi, membanjirnya pendatang baru untuk mengadu nasib di Jakarta, semakin membebani pula kota Jakarta dalam penanggulangan masalah tenaga kerja. Kecenderungan yang sama juga terjadi pada jumlah penduduk miskin, meskipun cenderung menurun, tahun 1999 sebesar 4,57 persen menjadi 4,08 persen tahun 2000, tetapi masih tetap cukup besar. Krisis ekonomi yang berkepanjangan, inflasi yang cukup tinggi dan jumlah pengangguran yang meningkat telah memperburuk peta kemiskinan penduduk kota dengan berbagai implikasinya.

2.4.3. Tantangan di bidang Sarana Prasarana Kota

Keterbatasan sarana dan prasarana kota telah menjadi persoalan klasik. Pertumbuhan penduduk yang pesat perlu diikuti dengan serangkaian program investasi perkotaan, dalam bentuk memperluas pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan di seluruh wilayah kota. Keterbatasan dana yang cukup untuk membangun dan memelihara prasarana kota, keterbatasan pemerintah kota dalam penyesuaian prosedur dan mekanisme pengelolaan prasarana dan sarana kota, dan penerapan metode pengembalian biaya (*cost recovery*) yang belum efektif dan konsisten, serta belum efektifnya penegakan hukum menyangkut pengaturan kota telah menimbulkan berbagai problema prasarana dan sarana perkotaan.

1. Ruang terbuka hijau dan keindahan kota yang belum optimal

Peningkatan kualitas lingkungan terkait dengan tersedianya ruang

terbuka hijau yang seimbang dengan kebutuhan fungsi ekologis untuk menjaga kualitas udara/lingkungan. Realitas yang ada menunjukkan ruang terbuka hijau semakin menyempit karena perubahan fungsi untuk kebutuhan prasarana kota dan penggunaan tanah secara liar serta penyerobotan tanah yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau. Pengadaan ruang terbuka hijau di kawasan baru belum optimal karena mahalnya harga tanah dan sulitnya pembebasan tanah.

Intensitas kegiatan yang tinggi menimbulkan masalah-masalah lingkungan yang semakin meningkat. Pencemaran udara berlangsung dengan intensitas tinggi yang berasal dari sumber bergerak (transportasi), sumber tidak bergerak (proses industri dan rumah tangga), dan sumber dari pembuangan/pembakaran limbah padat. Pencemaran air juga terjadi dalam skala luas, bersumber pada limbah cair kegiatan usaha dan rumah tangga. Tingginya tingkat pencemaran telah menempatkan Propinsi DKI Jakarta sebagai kota ketiga di dunia dengan tingkat polusi yang tinggi.

2. Kualitas lingkungan yang belum memadai

Lingkungan merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia dalam melakukan suatu kegiatan. Untuk itu upaya menciptakan suasana kota yang bersih, terbebas dari segala polusi dan penumpukan sampah perlu dilakukan guna mencapai kesejahteraan masyarakat dalam kualitas lingkungan yang semakin baik dan sehat.

3. Penataan ruang yang belum efektif memenuhi dinamika kebutuhan masyarakat

Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk memberi arah bagi pembangunan ruang kota yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Selain itu penataan ruang juga bertujuan untuk memanfaatkan ruang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Masalah substansial dan operasional dalam penataan ruang selain karena tata ruang masih bersifat abstrak interpretatif, adalah juga karena adanya kecenderungan egoisme sektor, sehingga penataan ruang yang dilakukan

bersifat birokratis. Pada sisi lain, lemahnya penegakan hukum terhadap tindakan perorangan dan kolektif yang bertentangan dengan tata ruang, kemiskinan kota dan tekanan pertambahan penduduk menyebabkan terganggunya keseimbangan lingkungan, yang membawa implikasi pada tidak terintegrasinya tata ruang wilayah dengan pemanfaatan ruang.

4. *Lalu lintas dan transportasi umum yang belum memadai*

Mobilitas yang tinggi menjadi ciri masyarakat Jakarta. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor yang tidak diimbangi dengan pertumbuhan panjang dan ruas jalan berakibat meningkatnya kepadatan lalu lintas yang menimbulkan kemacetan. Kendaraan yang terlalu banyak di jalan menimbulkan semakin banyaknya titik rawan kemacetan. Keadaan lalu lintas semakin parah dengan kondisi angkutan umum yang buruk dan tidak tertib, yang menyebabkan penggunaan kendaraan pribadi menjadi pilihan sebagian warga kota. Manajemen lalu lintas tidak optimal karena perbandingan jumlah kendaraan dan fasilitas jalan (termasuk terminal) yang tidak berimbang.

5. *Pengelolaan sampah dan air limbah yang belum tertangani dengan baik*

Masalah sampah yang menonjol tampak pada pewadahan dan pengumpulan, terutama pada wilayah permukiman kumuh yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam suatu sistem, sehingga pengangkutan sampah belum optimal. Pembangunan sistem peralihan antara, yang belum sepenuhnya terealisasi, kualitas dan jumlah armada pengangkutan sampah dan air limbah yang belum memadai menyebabkan pengangkutan sampah ke TPA belum optimal. Begitu pula pengelolaan air limbah belum berjalan dan ditangani secara optimal.

6. *Jangkauan fasilitas air bersih yang terbatas*

Pelayanan air minum yang memenuhi persyaratan kesehatan merupakan salah satu jasa pelayanan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah kota. Pada aspek ini pelayanan belum optimal, yang tampak dari jaringan yang masih terbatas pada wilayah tertentu dengan cakupan pelayanan

yang masih sempit dan produksi yang belum optimal. Dengan demikian penggunaan air tanah semakin meluas. Penambahan produksi dan jaringan layanan memerlukan biaya yang cukup besar karena wilayah layanan yang luas. Penurunan kualitas dan kuantitas karena aktivitas penduduk di sektor *catchment* menyebabkan menurunnya kualitas air dan kelangsungan produksi air minum.

7. Sistem pengendalian banjir, pemeliharaan sungai dan drainase kota yang belum baik

Wilayah Propinsi DKI Jakarta dilalui oleh 13 aliran sungai, sehingga sebagian wilayah Jakarta adalah wilayah rawan banjir/genangan. Banyaknya hunian yang berada pada lahan basah atau daerah parkir air menyebabkan kemampuan tanah menyerap air menjadi sangat berkurang. Kantung-kantung air yang berubah menjadi pemukiman, penyempitan alur sungai daerah hilir yang diperparah dengan sedimentasi sungai pada daerah yang relatif datar, menjadi faktor utama penyebab banjir. Selain itu hujan lokal dengan intensitas yang tinggi dan laut pasang merupakan faktor-faktor alam penyebab banjir yang sulit dihindarkan.

Pemukiman di sepanjang daerah aliran sungai atau bantaran sungai telah menyebabkan terjadinya penyempitan alur sungai dan tidak optimalnya fungsi sungai sebagai pencegah banjir. Penertiban pemukiman yang berada di sepanjang bantaran sungai yang mendapat perlawanan dari warga setempat, jumlah penduduk miskin kota yang besar menyebabkan sulitnya penataan daerah aliran sungai dan peningkatan kualitas air sungai.

8. Perumahan dan penanganan daerah kumuh yang belum optimal

Besarnya jumlah penduduk yang bermukim pada lahan yang terbatas menjadi akar masalah perumahan. Kondisi ekonomi yang lemah dari sebagian besar warga kota menyebabkan ketidakmampuan mereka untuk memiliki lahan dan perumahan yang layak. Jumlah penduduk yang besar telah malampaui daya dukung kota dalam menyediakan perumahan yang layak bagi penduduk. Akibatnya, penataan menjadi sulit dilakukan. Munculnya kawasan kumuh, dan

banyaknya rumah tangga yang tinggal di bantaran sungai dan sepanjang rel kereta api menjadi tidak terhindarkan. Banyaknya bangunan dan perumahan menyebabkan kemampuan tanah dalam menyerap air menjadi sangat berkurang. Lahan basah yang berfungsi sebagai kantong air berubah menjadi bangunan. Akibatnya Jakarta menjadi rawan banjir.

Di lain pihak, upaya penertiban tampak belum berjalan lancar karena sikap resistensi dari masyarakat dan isu HAM. Penertiban juga seringkali terlambat setelah persoalannya bertambah besar.

9. Areal interaksi publik yang masih terbatas

Jumlah penduduk kota yang sangat padat mengakibatkan semakin meningkatnya permintaan akan areal interaksi publik yang berguna sebagai sarana pemenuhan kebutuhan sosial masyarakat. Akan tetapi dengan lahan yang terbatas menyebabkan timbulnya kesulitan dalam hal penyediaan sarana tersebut.

2.4.4. Tantangan di bidang Pengelolaan Tata Pemerintahan

Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan adalah kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi utamanya yaitu menjamin ketentraman dan ketertiban, menyelenggarakan pelayanan masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Problema dalam mengoptimalkan efektifitas pemerintahan adalah akseptabilitas atau kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang cenderung merosot setelah reformasi. Lemahnya legitimasi menyebabkan kurang efektifnya pemerintah sebagai institusi pengatur yang berwibawa. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pemerintahan adalah:

1. Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta partisipasi masyarakat yang belum optimal

Bersamaan dengan krisis ekonomi dan krisis pemerintahan Pasca

Pemerintahan Orde Baru adalah meningkatnya gangguan keamanan. Ketentraman dan ketertiban masyarakat menurun dengan intensitas yang tinggi, yang dipicu antara lain oleh potensi konflik antar kelompok, ancaman dan ledakan bom, tawuran antar pelajar, aksi unjuk rasa dan bentuk gangguan lainnya. Implikasinya, selain menimbulkan rasa takut, rasa tidak aman dan kekhawatiran warga kota, juga menyebabkan tidak efektifnya penyelenggaraan pemerintahan.

2. Peraturan perundang-undangan daerah yang belum memadai

Gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat yang cenderung terus berlangsung, dan belum pulihnya kepercayaan terhadap pemerintah pada semua tingkat, menyebabkan tidak efektifnya pemerintah dalam melakukan penegakan peraturan perundangan. Upaya-upaya pemerintah daerah untuk melakukan penegakan hukum direspon dengan perlawanan warga kota. Di lain pihak peraturan perundang-undangan yang ada belum optimal dan sebagian lagi sudah tidak relevan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat pada saat sekarang yang memerlukan peninjauan dan evaluasi secara menyeluruh.

3. Spirit dan etos kerja aparat yang perlu ditingkatkan

Peningkatan kualitas aparat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat merupakan hal yang mutlak dalam suatu pemerintahan yang baik. Kondisi ini dapat tercapai apabila aparat pemerintah daerah memiliki kesadaran akan tugas dan tanggung jawabnya, serta memiliki spirit dan etos kerja yang baik.

4. Kinerja pelayanan masyarakat yang belum optimal

Pelayanan masyarakat sebagai fungsi utama pemerintah daerah belum terselenggara berdasarkan prinsip-prinsip pelayanan yang baik dan prima. Prinsip pendekatan pelayanan ke tengah masyarakat, kecepatan dan ketepatan serta efisiensi pelayanan belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Implikasinya,

citra pemerintah kota menjadi kurang terapresiasi dengan baik.

5. Kualitas aparatur dan penanganan KKN yang masih perlu ditingkatkan

Pergeseran paradigma pemerintah yang lebih memberi keleluasaan kepada daerah dan lebih menekankan pada pelayanan masyarakat belum diikuti dengan perubahan kinerja birokrasi. Perubahan kelembagaan belum sepenuhnya dapat diimplementasikan dimana birokrasi belum memiliki kompetensi dan kapasitas yang memadai yang sesuai dengan tuntutan perubahan. Sementara itu, penanganan dan pencegahan terhadap korupsi, kolusi dan nepotisme belum optimal karena pengawasan yang belum efektif dan kevakuman etika menyebabkan pelaksanaan tugas-tugas birokrasi kehilangan nilai-nilai yang harus dijunjung.

6. Pendelegasian wewenang kepada wilayah belum optimal

Seiring dengan Otonomi Daerah, maka semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan untuk mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan, khususnya proses pengelolaan keuangan daerah. Sehubungan dengan itu pendelegasian wewenang yang lebih konkrit kepada wilayah yang lebih kecil menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan.

Bertolak dari realitas yang ada dan kompleksnya masalah yang dihadapi Jakarta masa kini, maka perlu dilakukan perubahan cara pemecahan masalah yang lebih pada pendekatan partisipatif dan manusiawi dalam rangka menciptakan *good governance* yang dirumuskan dalam visi baru Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.